



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2020

**BAPPEDA
Provinsi Sumatera Barat**



PADANG, FEBRUARI 2020

KATA PENGANTAR

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk meminimalkan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perlu komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian dan dapat bermanfaat serta memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Juni 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Kepala,



Hansastri, SE, AK, MM, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN ..	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
 BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	
A. Pengertian SPIP.....	7
B. Tujuan SPIP.....	8
C. Unsur-unsur Dalam SPIP....	8
D. Pernyataan Tanggung Jawab.....	12
 BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	 13
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	13
B. Kondisi Lingkuagn Pengendalian Saat Ini.....	14
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	15
 BAB IV RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	 18
A. Pernyataan Tujuan.....	18
B. Penilaian Resiko.....	18
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	21
D. Kegiatan pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	22
 BAB V INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	 25
 BAB VI PEMANATAUAN DAN EVALUASI.....	 31
 BAB VII PENUTUP.....	 32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian Tahun 2019.....	15
Tabel 2 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian Tahun 2020.....	16
Tabel 3 Level Resiko.....	19
Tabel 4 Pernyataan Resiko Tahun 2020	19
Tabel 5 Pengendalian Terpasang.	22
Tabel 6 Kegaitan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	22
Tabel 7 Informasi dan Komunikasi.	25

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2 Struktur Organisasi	5
Grafik 3 Dimensi Pengukuran Kategori Resiko.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif , efisien, transparan dan akuntabel maka pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui 4 (empat) pilar yaitu :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/155/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020;
10. Peraturan Kepala Bappeda Nomor 020/17.A/II/SET/BAPPEDA-2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Sekretariat dan Bidang-bidang.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Program
 - c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
 - a) Sub Bidang Perencanaan Makro
 - b) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
 - c) Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan

4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

- a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- b) Sub Bidang Sosial Budaya
- c) Sub Bidang Sumber Daya Manusia

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

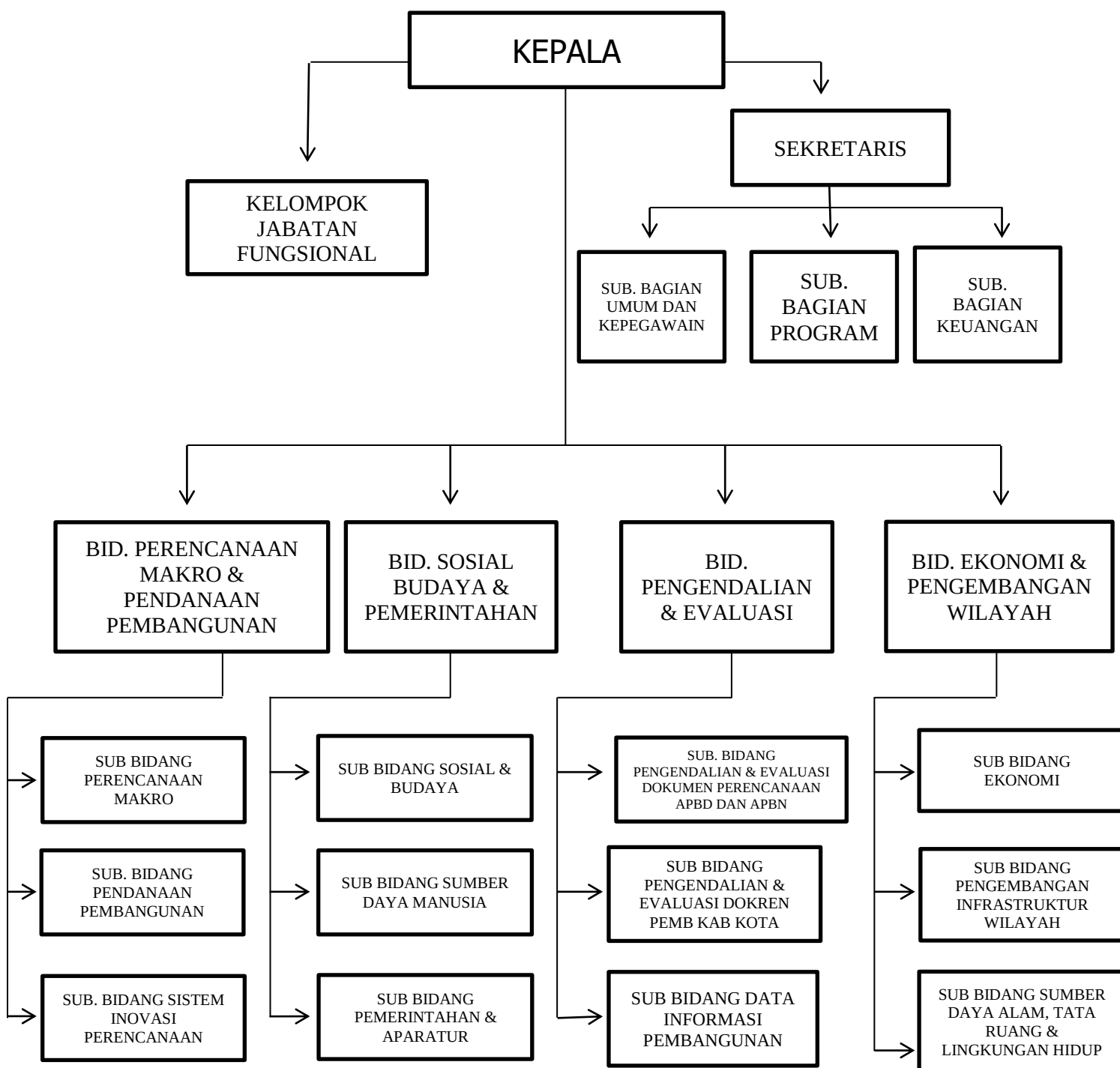
- a) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN
- b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota
- c) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

6. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

- a) Sub Bidang Ekonomi
- b) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- c) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Disamping jabatan struktural, terdapat kelompok jabatan fungsional yang merupakan fungsi teknis perencanaan, yang kedudukannya langsung di bawah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

Grafik 1
Struktur Organisasi
Bappeda Provinsi Sumatera Barat



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan , dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Penyediaan database perencanaan pembangunan daerah
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan
6. Pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Semua dapat dicapai jika seluruh penyelenggara negara dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana mampu melaksanakannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan lebih lanjut ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan latar belakang tersebut, dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolak ukur efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai **proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,**

dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur Dalam SPIP

Seperti telah disebutkan pada butir I.4 Ruang Lingkup bahwa suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor atau unsur. Hal tersebut

dalam SPIP diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta system pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi risiko dan menguraikan seluruh risiko potensial baik yang disebabkan faktor internal maupun factor eksternal.
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan

kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa resiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian :

- 1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- 2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
- 3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
- 4) Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis
- 5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
- 6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara terukur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Secara terus menerus memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan juga untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Tujuan Umum

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi seluruh unsur lain dalam SPIP. Lingkungan pengendalian mencakup para personil/orang-orang dalam organisasi yaitu meliputi filosofi, gaya dan perilaku, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral. Bila lingkungan pengendalian tidak kuat, maka SPIP tidak akan efektif.

Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dan dibangun dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pembangunan lingkungan pengendalian secara umum bertujuan untuk menciptakan atmosfir atau suasana kerja kondusif yang membentuk pengendalian intern yang efektif.

Lingkungan pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan efektif bila seluruh personil mempunyai kompetensi sesuai kebutuhannya, memahami tanggung jawabnya, batasan kewenangan, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan seharusnya. Seluruh personil harus berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi, berikut standar etika dan perilaku.

Tujuan Khusus

Peningkatan kualitas lingkungan pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara khusus diarahkan pada

delapan sub unsur lingkungan pengendalian sebagaimana diatur dalam SPIP yaitu :

1. Tegaknya integritas, nilai etika dan budaya kerja,
2. Terbangunnya komitmen terhadap kompetensi SDM,
3. Terwujudnya kepemimpinan yang kondusif,
4. Terciptanya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
5. Terlaksananya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat,
6. Terlaksananya pengelolaan SDM yang berkualitas,
7. Termanfaatkannya peran aparat pengawasan intern pemerintah secara lebih intensif,
8. Terjalinnya hubungan kerja yang baik antar instansi,

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Terkait kondisi lingkungan pengendalian saat ini, dapat digambarkan dengan hasil survey yang dilaksanakan melalui pengisian kuisioner kepada 75 responden yang terdiri dari pejabat struktural dan fungsional umum pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan langkah sebagai berikut :

1. Membuat rekapitulasi dari pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian berdasarkan isian kuesioner responden mewakili seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian
3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran yang sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan instansi Pemerintah terkait	Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Bappeda Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1. Kode etik perlu dimutakhirkan secara rutin 2. Optimalisasi pelaksanaan dan sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai 3. Pemanfaatan media internal guna menginformasikan pelaksanaan kode etik 4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kode etik 5. Penerapan penggajian yang berbasis kinerja untuk mendorong peningkatan integritas
2	Komitmen terhadap Kompetensi	1. Mengkomunikasikan Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai 2. Melakukan pelatihan yang memadai sebelum pegawai menduduki posisi penting sesuai dengan uraian tugas 3. Melakukan evaluasi atas kompetensi Aparatur 4. Mengusulkan penambahan jumlah Aparatur Perencana 5. Menyusun Analisa Jabatan sesuai dengan struktur organisasi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	1. Evaluasi atas kompetensi masing-masing Pejabat Struktural 2. Menyusun dan menetapkan SK Tim Pengendali Internal Perangkat Daerah 3. Sosialisasi Sistem Pengendalian Internal kepada seluruh Aparatur 4. Penyusunan analisis resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggungjawab 5. Memfungsikan seluruh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	1. Evaluasi atas keberadaan struktur organisasi yang ditetapkan berikut resiko yang mungkin muncul
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	1. Melakukan reviu, verifikasi dan pengujian batas kewenangan secara periodik 2. Penyusunan laporan pendelegasian wewenang atas setiap pendelegasian wewenang yang dilakukan

6	Kebijakan Pengembangan SDM	1. Menyusun prosedur pendistribusian Pegawai sesuai Kompetensi 2. Perencanaan Pengembangan SDM 3. Peningkatan intensitas pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran pegawai 4. Melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik
7	Pengawasan Internal yang Efektif	1. Peningkatkan keikutsertaan setiap pegawai dalam pengawasan internal organisasi
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	1. Peningkatkan hubungan kerja yang lebih profesional dengan instansi lain untuk kemajuan organisasi

BAB IV

RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaran SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2020 rencana tindak pengendalian yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan pada tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Meningkatnya kinerja organisasi

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- ✓ Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan

Sasaran tersebut dicapai dengan indikator :

- ✓ Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan

B. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis resiko guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang

ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen dengan urutan level sebagai berikut :

Tabel 3
Level Resiko
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Level Risiko	Kemungkinan
1 (Jarang Sekali)	Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan
2 (Jarang)	Mungkin terjadi sekali dalam 10 Tahun
3 (Sering)	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4 (Sangat Sering)	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Level Risiko	Dampak
1 (Rendah Sekali)	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (masuk dalam pemberitaan media lokal)
2 (Rendah)	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (masuk dalam pemberitaan media nasional)
3 (Tinggi)	Merusak citra institusi dalam skala Nasional (telah masuk dalam pemberitaan nasional)
4 (Tinggi Sekali)	Merusak citra institusi dalam skala Nasional, Penggantian pucuk pimpinan secara mendadak

Risiko atas pencapaian adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Pernyataan Resiko
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

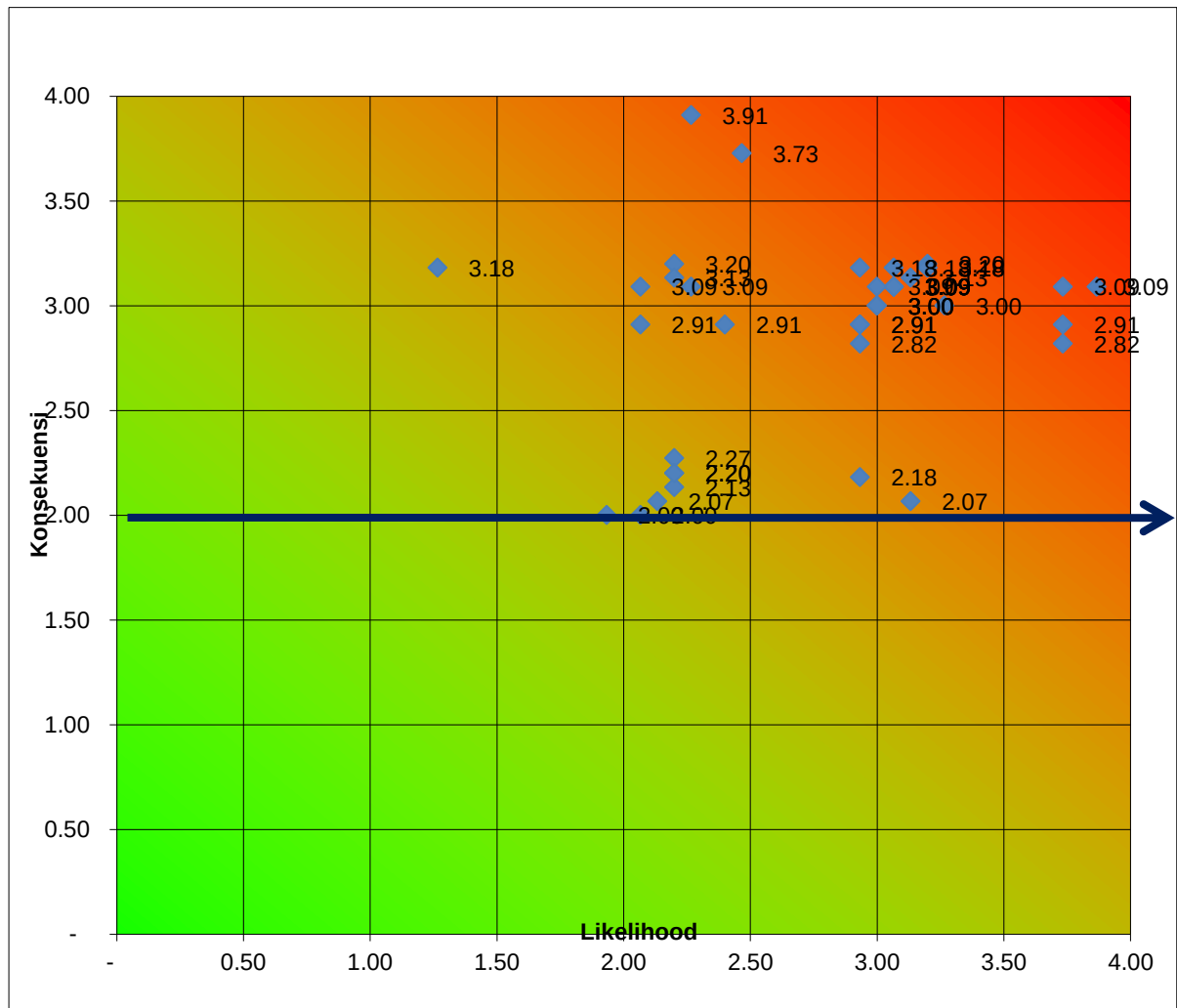
No	Nama Resiko
1	Belum optimalnya penyusunan pendekatan perencanaan secara partisipatif
2	Belum optimalnya kesesuaian antara RKPD dengan KUA PPAS
3	Pemakaian aplikasi Sakato Plan belum optimal
4	Tidak tersedianya data usulan proyek daerah berserta progres yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Swasta (badan Usaha)
5	Belum optimalnya kesesuaian antara KUA PPAS dengan RKPD
6	Tidak terdistribusikannya dokumen perencanaan tepat waktu
7	Peningkatan kapasitas perencana belum terpenuhi
8	Tidak tersedianya data, analisis untuk perumusan masalah dan isu strategis dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026

9	Kualitas data dan informasi yang disajikan
10	Belum tercapainya penyelenggaraan data dan informasi spasial secara terintegrasi, tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran
11	Data yang diterima tidak akurat
12	Tidak adanya partisipasi pemerintah dalam kerjasama di tingkat regional maupun internasional
13	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat
14	Laporan RAD tidak maksimal
15	Tidak terlaksananya koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah
16	Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yg ditetapkan
17	Tidak tercapainya target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
18	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan dan tertundanya dan terkendalanya beberapa kegiatan akibat protokol covid 19
19	Tidak tersedianya dokumen RAN PPDT 2022
20	Tidak tercapainya target program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat
21	Tidak tersedianya buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019
22	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
23	Tidak tersedianya laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas
24	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
25	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan dan kerjasama pembangunan ekonomi baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran
26	Pelaksanaan rapat tidak sesuai jadwal yang direncanakan
27	Penyampaian laporan terlambat dari OPD
28	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pertanian dan Perikanan
29	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha
30	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran
31	Tidak tercapainya target sasaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan tidak terlaksananya sebagian kegiatan akibat covid19
32	Tidak terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi, 2 Tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan karena rasionalisasi anggaran
33	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung sanitasi pemukiman dan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran
34	Sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran
35	Tidak tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota pada bidang pembangunan

	sosial budaya dan pemerintahan.
36	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat
37	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang pemerintahan dan Aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat
38	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang sumber daya aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat
39	Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga (SABRT) belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya koordinasi penyediaan PAMSIMAS
40	Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat
41	Tidak tersusunnya laporan koordinasi"
42	Tidak tercapainya target program/kegiatan yang bersifat lintas sektor
43	Tidak terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Pangan dan Gizi bagi Balita dan stunting
44	Dokumen perencanaan yang dievaluasi tidak konsistensi dan sinergisitas
45	Evaluasi Dokumen perencanaan terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan
46	PUG belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah
47	Tidak tersedianya usulan program/kegiatan daerah yang akan dibiayai dengan dana APBN ddalam aplikasi perencanaan nasional
48	Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak sinergi dan terintegrasi
49	Menurunnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :

Grafik 2
Dimensi Pengukuran Kategori Risiko
Bappeda Provinsi Sumatera Barat



Keterangan :
Tingkat I : Level risiko sangat rendah
Tingkat II : Level risiko rendah
Tingkat III : Level risiko tinggi
Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sejauh ini dalam mengendalikan risiko, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa

pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut :

Tabel 5
Pengendalian Terpasang
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Pengendalian Terpasang
1	Rapat Monitoring secara berkala dan Peningkatan SDM Staf
2	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan
3	Rapat koordinasi penyusunan dokumen
4	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan
5	Kerangka kerja (framework) dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)
6	Komitmen antar pemangku kepentingan
7	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional
8	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs
9	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi
10	Peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan,
11	Komitmen antar pemangku kepentingan
12	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi
13	Komitmen antar pemangku kepentingan
14	Rapat koordinasi terkait rencana pengembangan sektor ekonomi
15	Komitmen antar pemangku kepentingan
16	Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya
17	Rapat-rapat Koordinasi tingkat Daerah dan Nasional
18	Melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD
19	Kurangnya pemahaman terkait aspek perencanaan sanitasi pemukiman dari OPD dan lembaga terkait, tidak aktifnya pokja/lembaga yang menangani sanitasi pemukiman, keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional pokja sanitasi pemukiman
20	Peningkatan koordinasi, sosialisasi untuk kesinambungan program Pasca WISMP,
21	Usulan rakorrenbang OPD Kab/Kota dapat difasilitasi dan direalisasikan
22	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting
23	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat
24	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan
25	Kesesuaian kondisi, permasalahan, isu, arah kebijakan, sasaran dan indikator dengan keadaan dan kemampuan daerah

D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa

kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain:

Tabel 6
Kegiatan Pengendalian
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Resiko	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan
1	Belum optimalnya penyusunan pendekatan perencanaan secara partisipatif	Mempublikasikan kegiatan Musrenbang jauh-jauh hari dan mengupayakan penyesuaian biaya pengumuman/peliputan di media dengan Standar Biaya
2	Belum optimalnya kesesuaian antara RKPD dengan KUA PPAS	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD
3	Pemakaian aplikasi Sakato Plan belum optimal	Peningkatan Kompetensi SDM dan penyempurnaan aplikasi Sakato Plan
4	Tidak tersedianya data usulan proyek daerah berserta progres yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Swasta (badan Usaha)	Menyurati kab/kota, Rapat koordinasi dengan Kab/kota dan OPD terkait
5	Belum optimalnya kesesuaian antara KUA PPAS dengan RKPD	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD
6	Tidak terdistribusikannya dokumen perencanaan tepat waktu	Rapat Monitoring secara berkala dan pendistribusian sesuai skala prioritas
7	Peningkatan kapasitas perencana belum terpenuhi	Koordinasi dengan BKD Prov dan biro organisasi, instansi pembina dan dengan tim TAPD
8	Tidak tersedianya data, analisis untuk perumusan masalah dan isu strategis dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	Mengumpulkan saran dan informasi untuk penyempurnaan draft RPJMD
9	Kualitas data dan informasi yang disajikan	Peningkatan kemampuan jurnalistik SDM
10	Belum tercapainya penyelenggaraan data dan informasi spasial secara terintegrasi, tidak terlaksanannya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi
11	Data yang diterima tidak akurat	Pemetaan data, verifikasi dan evaluasi terhadap data yang dibutuhkan
12	Tidak adanya partisipasi pemerintah dalam kerjasama di tingkat regional maupun internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional

13	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs
14	Laporan RAD tidak maksimal	Melakukan monitoring dan rapat2 dengan kab.kota, pemantauan dengan Bapenas
15	Tidak terlaksananya koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi
16	Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yg ditetapkan	Melakukan reskedul
17	Tidak tercapainya target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat	Menyusun SOP dan melakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota serta melibatkan TNP2K atau K/L terkait lainnya
18	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan dan tertundanya dan terkendalanya beberapa kegiatan akibat protokol covid 19	Peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan penerapan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan new normal
19	Tidak tersedianya dokumen RAN PPDT 2022	Komitmen antar pemangku kepentingan
20	Tidak tercapainya target program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten daerah tertinggal serta perangkat daerah terkait di daerah
21	Tidak tersedianya buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi
22	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi data, rapat-rapat.
23	Tidak tersedianya laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bapenas	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat.
24	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Meminta data melalui media informasi ke Kab/Kota dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD dilingkup Provinsi dan Kab/Kota
25	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan dan kerjasama pembangunan ekonomi baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang ekonomi, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD
26	Pelaksanaan rapat tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Komitmen antar pemangku kepentingan serta mereskedul jadwal rapat
27	Penyampaian laporan terlambat dari OPD	Membuat surat permintaan laporan ke OPD dengan batas waktu yang ditentukan dan membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, rapat-rapat, dan verifikasi.
28	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi
29	Tidak terlaksananya secara optimal	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi

	akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha	
30	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	Melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang SDA Tata Ruang dan LH , melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD
31	Tidak tercapainya target sasaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan tidak terlaksananya sebagian kegiatan akibat covid19	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi
32	Tidak terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi, 2 Tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan karena rasionalisasi anggaran	Melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD
33	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung sanitasi pemukiman dan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi
34	Sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi
35	Tidak tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota pada bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.	Peningkatan koordinasi antar sektor secara integrasi melalui Rapat Koordinasi, mengikuti rapat-rapat tingkat pusat dan melakukan verifikasi renja
36	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi
37	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang pemerintahan dan Aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi
38	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang sumber daya aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi
39	Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga	Advokasi ke kab/ko, mengadakan

	(SABRT) belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya koordinasi penyediaan PAMSIMAS	bintek/workshop untuk SDM Kab/Ko, pendampingan terhadap penyelesaian masalah dan mengadakan Rakor dengan pemerintah pusat, kab/ko
40	Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat	Usulan rakorrenbang OPD Provinsi dan Kab/Kota
41	Tidak tersusunnya laporan koordinasi"	Menyusun SOP, melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Pusat
42	Tidak tercapainya target program/kegiatan yang bersifat lintas sektor	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting
43	Tidak terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Pangan dan Gizi bagi Balita dan stunting	Komitmen antar pemangku kepentingan
44	Dokumen perencanaan yang dievaluasi tidak konsistensi dan sinergisitas	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat, konsultasi, peningkatan SDM di OPD dan kab/kota.
45	Evaluasi Dokumen perencanaan terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan	Rapat Koordinasi secara berkala, Rencana Aksi Daerah PUG, Pemantauan/Monev melibatkan Kantor Staf Presiden melalui MOU dan PKS
46	PUG belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat
47	Tidak tersedianya usulan program/kegiatan daerah yang akan dibiayai dengan dana APBN ddalam aplikasi perencanaan nasional	Melakukan Rapat Koordinasi, peningkatan kapasitas TKPK dengan melibatkan Kabupaten/kota dan TNP2K
48	Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak sinergi dan terintegrasi	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan
49	Menurunnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	Koordinasi dg pihak DPRD, membuat kesepakatan dengan pihak terkait dan reskedul

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun, diperlukan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut

Tabel 7
Informasi dan Komunikasi
Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Resiko	Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	Informasi Yang Dibutuhkan	Media/Bentuk /Sarana Komunikasi
1	Belum optimalnya penyusunan pendekatan perencanaan secara partisipatif	Mempublikasikan kegiatan Musrenbang jauh-jauh hari dan mengupayakan penyesuaian biaya pengumuman/peliputan di media dengan Standar Biaya	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
2	Belum optimalnya kesesuaian antara RKPD dengan KUA PPAS	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
3	Pemakaian aplikasi Sakato Plan belum optimal	Peningkatan Kompetensi SDM dan penyempurnaan aplikasi Sakato Plan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp

4	Tidak tersedianya data usulan proyek daerah berserta progres yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Swasta (badan Usaha)	Menyurati kab/kota, Rapat koordinasi dengan Kab/kota dan OPD terkait	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
5	Belum optimalnya kesesuaian antara KUA PPAS dengan RKPD	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	Kegiatan/acara/event yang dilaksanakan oleh bidang-bidang	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
6	Tidak terdistribusikannya dokumen perencanaan tepat waktu	Rapat Monitoring secara berkala dan pendistribusian sesuai skala prioritas	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Rapat Monitoring 2. Rapat Koordinasi, Pengendalian dan Monitoring
7	Peningkatan kapasitas perencanaan belum terpenuhi	Koordinasi dengan BKD Prov dan biro organisasi, instansi pembina dan dengan tim TAPD	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	Rapat Monitoring
8	Tidak tersedianya data, analisis untuk perumusan masalah dan isu strategis dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	Mengumpulkan saran dan informasi untuk penyempurnaan draft RPJMD	SK, Dokumen Perencanaan	Rapat koordinasi
9	Kualitas data dan informasi yang disajikan	Peningkatan kemampuan jurnalistik SDM	Kegiatan/acara/event yang dilaksanakan oleh bidang-bidang	1. rapat Monitoring 2. Bimtek

				Jurnalistik
10	Belum tercapainya penyelenggaraan data dan informasi spasial secara terintegrasi, tidak terlaksanannya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	RPJMD, peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi geospasial berbasis GIS	1. Surat 2. Email 3. Media Sosial 4. Rapat Koordinasi via vidcon
11	Data yang diterima tidak akurat	Pemetaan data, verifikasi dan evaluasi terhadap data yang dibutuhkan	Data makro, permasalahan dan isu penyelenggaraan pembangunan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah Secara langsung atau online
12	Tidak adanya partisipasi pemerintah dalam kerjasama di tingkat regional maupun internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional	RPJMD, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerjasama	Rapat Internal dan rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga terkait
13	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	SK, RAD SDGs	Aplikasi e-Planning untuk SDGs
14	Laporan RAD tidak maksimal	Melakukan monitoring dan rapat2 dengan kab.kota, pemantauan dengan Bapenas	Data makro dan program/kegiatan terkait kemiskinan	Aplikasi e-Planning untuk SDGs
15	Tidak terlaksananya koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	regulasi dan panduan terkait pelaksanaan Program IPDMIP	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota
16	Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yg ditetapkan	Melakukan reskedul	Program/kegiatan kegiatan PPDT	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota
17	Tidak tercapainya target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di	Menyusun SOP dan melakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan	Realisasi Indikator Capaian dan Keuangan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi

	Sumatera Barat	kabupaten/kota serta melibatkan TNP2K atau K/L terkait lainnya		dan kab/kota
18	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan dan tertundanya dan terkendalanya beberapa kegiatan akibat protokol covid	Peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan penerapan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan new normal	Realisasi Dekon TP	"1. Pedoman dan panduan pelaksanaan Program IPDMIP, Surat Keputusan Gubernur tentang Provincial Project Management Unit Program IPDMIP 2. Surat. 3. Email 4. Whatsapp 5. Rapat Koordinasi via Vidcon
19	Tidak tersedianya dokumen RAN PPDT 2022	Komitmen antar pemangku kepentingan	Undang-undang, peraturan menteri, RPJMD, Renstra dan RKPD	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kabupaten entas dan daerah tertinggal
20	Tidak tercapainya target program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten daerah tertinggal serta perangkat daerah terkait di daerah	Dokumen Perencanaan OPD	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kabupaten entas dan daerah tertinggal
21	Tidak tersedianya buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah secara langsung maupun online
22	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi data, rapat-rapat.	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur	Rapat koordinasi bersama perangkat

			arah kebijakan	daerah secara langsung maupun online
23	Tidak tersedianya laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat.	RPJMD, peraturan perundang-undangan yang mengatur sub bidang SDA, Tata Ruang dan LH	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota secara langsung maupun online
24	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Meminta data melalui media informasi ke Kab/Kota dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota secara langsung maupun online
25	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan dan kerjasama pembangunan ekonomi baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang ekonomi, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	Regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan, data terkait infrastruktur dan kewilayahan	1. Surat. 2. Email 3. Whatsapps 4. Rapat Koordinasi via Vidcon
26	Pelaksanaan rapat tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Komitmen antar pemangku kepentingan serta mereskedul jadwal rapat	Dokumen Perencanaan OPD	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah secara langsung maupun online
27	Penyampaian laporan terlambat dari OPD	Membuat surat permintaan laporan ke OPD dengan batas waktu yang ditentukan dan membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, rapat-rapat, dan	Dokumen Perencanaan OPD	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah secara langsung maupun online

		verifikasi.		
28	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	1. Surat. 2. Email 3. Whatsapps 4. Rapat Koordinasi via Vidcon
29	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	1. Surat. 2. Email 3. Whatsapps 4. Rapat Koordinasi via Vidcon
30	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	Melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang SDA Tata Ruang dan LH , melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	1. Surat. 2. Email 3. Whatsapps 4. Rapat Koordinasi via Vidcon
31	Tidak tercapainya target sasaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan tidak terlaksananya sebagian kegiatan akibat covid19	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi	Dokumen perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
32	Tidak terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi, 2 Tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan karena rasionalisasi anggaran	Melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD	Regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan, data terkait infrastruktur dan kewilayahan	1. RPJMN, RPJMD, G44 Renstra OPD 2. Surat. 3. Email 4. Whatsapp 5. Rapat Koordinasi via Vidcon

		dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD		
33	Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung sanitasi pemukiman dan sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	regulasi, kebijakan dan aturan terkait perencanaan pembangunan sanitasi permukiman	1. Renstra OPD ,SK Gubernur terkait Pokja Sanitasi 2. Surat. 3. Email 4. Whatsapp 5. Rapat Koordinasi via Vidcon
34	Sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksnakan akibat rasionalisasi anggaran	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	regulasi dan panduan yang mengatur kelembagaan sumberdaya air	1. Surat Keputusan Gubernur terkait kelembagaan sumberdaya air 2. Surat. 3. Email 4. Whatsapp 5. Rapat Koordinasi via Vidcon
35	Tidak tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota pada bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.	Peningkatan koordinasi antar sektor secara integrasi melalui Rapat Koordinasi, mengikuti rapat-rapat tingkat pusat dan melakukan verifikasi renja	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada "	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
36	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompeten dalam setiap rapat koordinasi	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
37	Tidak tercapainya target sasaran	Melaksanakan rapat koordinasi dengan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran	1. Surat, Nota Dinas

	pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang pemerintahan dan Aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
38	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang sumber daya aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
39	Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga (SABRT) belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya koordinasi penyediaan PAMSIMAS	Advokasi ke kab/ko, mengadakan bintek/workshop untuk SDM Kab/Ko, pendampingan terhadap penyelesaian masalah dan mengadakan Rakor dengan pemerintah pusat, kab/ko	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
40	Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat	Usulan rakorrenbang OPD Provinsi dan Kab/Kota	RPJMD, Renja OPD	Aplikasi e-Planning
41	Tidak tersusunnya laporan koordinasi"	Menyusun SOP, melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Pusat	RPJMD, Renja OPD	Aplikasi e-Planning
42	Tidak tercapainya target program/kegiatan	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan	SK, RAD Pangan dan Gizi	Aplikasi e-Planning untuk Pangan dan Gizi

	yang bersifat lintas sektor	pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting		
43	Tidak terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Pangan dan Gizi bagi Balita dan stunting	Komitmen antar pemangku kepentingan	Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota
44	Dokumen perencanaan yang dievaluasi tidak konsistensi dan sinergisitas	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat, konsultasi, peningkatan SDM di OPD dan kab/kota.	Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat, konsultasi, peningkatan SDM di OPD dan kab/kota.
45	Evaluasi Dokumen perencanaan terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan	Rapat Koordinasi secara berkala, Rencana Aksi Daerah PUG, Pemantauan/Monev melibatkan Kantor Staf Presiden melalui MOU dan PKS	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp
46	PUG belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat	SK, Dokumen Perencanaan	Aplikasi e-Planning untuk SDGs
47	Tidak tersedianya usulan program/kegiatan daerah yang akan dibiayai dengan dana APBN dalam aplikasi perencanaan nasional	Melakukan Rapat Koordinasi, peningkatan kapasitas TKPK dengan melibatkan Kabupaten/kota dan TNP2K	Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, data kondisi kemiskinan serta prioritas bidang dan intervensi kemiskinan	Pelatihan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota
48	Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak sinergi dan terintegrasi	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, data kondisi kemiskinan serta prioritas bidang	Pelatihan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota

			dan intervensi kemiskinan	
49	Menurunnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	Koordinasi dg pihak DPRD, membuat kesepakatan dengan pihak terkait dan reskedul	Data makro, permasalahan dan isu penyelenggaraan pembangunan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauandan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reuiu.

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reuiu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat.

BAB VII

PENUTUP

Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan Statement of Responsibility dalam Laporan Keuangan.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Kepala,**

**Hansastri, SE, AK, MM, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555, 7054374 Fax. 0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 020/17.A/II/SET/BAPPEDA-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah terkait;
- d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

- e. Melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, DPA Badan Perencanaan Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 14 Februari 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Hansastri, SE Ak, MM, CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bappeda	Koordinator
3.	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Koordinator
4.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Koordinator
5.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Koordinator
6.	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan	Koordinator
7.	Kasubbid Perencanaan Makro	Anggota
8.	Kasubbid Pendanaan Pembangunan	Anggota
9.	Kasubbid Sistem Inovasi Perencanaan	Anggota
10.	Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur	Anggota
11.	Kasubbid Sosial Budaya	Anggota
12.	Kasubbid Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Kasubbid Ekonomi	Anggota
14.	Kasubbid Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
15.	Kasubbid SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan APBD dan APBD	Anggota
17.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota	Anggota
18.	Kasubbid Data Informasi Pembangunan	Anggota
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
20.	Kasubbag Program	Anggota
21.	Kasubbag Keuangan	Anggota

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Kepala,

Hansastry, SE/Ak, MM, CFrA

Pembina Utama Madya

NIP. 19641013 199103 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
PADANG 25118

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami :

- | | | | |
|---|---------|---|--|
| 1 | Nama | : | Drs. H. Mardi, M.M. |
| | NIP | : | 19601211 198203 1 007 |
| | Jabatan | : | Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat |

Sebagai “Pihak Pertama”

- | | | | |
|---|---------|---|--|
| 2 | Nama | : | Hansastri, S.E.Ak., M.M., CFrA |
| | NIP | : | 19641013 199103 1 001 |
| | Jabatan | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat |

Sebagai “Pihak Kedua”

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil evaluasi manajemen risiko OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari 65 (enam puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang dilakukan penilaian risiko;
2. Dari 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang dinilai risikonya kemudian dibuat ranking dari risiko tinggi ke risiko rendah;
3. Kegiatan dengan nilai risiko tinggi menjadi prioritas pengawasan oleh pimpinan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Secara berkala OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan pemantauan dan pembaruan dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko penilaian risiko dan penilaian efektivitas rencana pengendalian.

Kedua belah pihak telah sepakat terhadap hasil evaluasi manajemen risiko.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Drs. H. Mardi, M.M.
NIP. 19601211 198203 1 007

Hansastri, S.E.Ak., M.M., CFrA
NIP. 19641013 199103 1 001

FORM ELP 4 : RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Prioritas	Tidak Prioritas
1	2	3	4	5
I	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Memadai	(√)	
1	Melakukan sosialisasi atau rapat dengan pegawai terkait dengan pelaksanaan penegakan kode etik	Memadai	(√)	
2	Memanggil pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik	Memadai	(√)	
II	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai		
3	Melakukan pengusulan penempatan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis jabatan	Memadai	(√)	
4	Membuat surat terkait dengan seleksi terbuka untuk jabatan yang lowong	Memadai	(√)	
5	Melakukan pengusulan pelatihan sebelum pegawai menduduki posisi penting	Memadai	(√)	
6	Melakukan Updating SOP untuk menilai kompetensi pegawai yang belum terdokumentasikan secara memadai	Memadai	(√)	
7	Melakukan pendataan terhadap assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci agar didokumentasikan secara lengkap	Memadai	(√)	
III	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai		
8	Membuat uraian tugas setiap pegawai	Memadai	(√)	
9	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait dengan tujuan pengendalian intern	Memadai	(√)	
10	Melakukan rapat staf agar gaya dan "tone" kepemimpinan dapat dirasakan secara kondusif baik di dalam maupun di luar organisasi	Memadai	(√)	
11	Melakukan diskusi terkait dengan risiko, pengendalian dan ketaatan pada saat rapat	Memadai	(√)	

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Prioritas	Tidak Prioritas
1	2	3	4	5
12	Melakukan rapat staf, sehingga Kepemimpinan organisasi dirasakan memadai dalam melaksanakan tugas	Memadai	(√)	
13	Mengikutkan staf /pegawai untuk mengikuti pelatihan/workshop terkait dengan pengendalian intern	Memadai	(√)	
14	Mengikutkan setiap pegawai turut serta dalam menetapkan tujuan pengendalian intern	Memadai	(√)	
IV	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai		
15	Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa desain struktur organisasi sudah sesuai dengan ukuran dan karakternya (Pergub No. 68 Tahun 2016)	Memadai	(√)	
16	Melakukan/memberikan pemahaman kepada pejabat yang ditunjuk agar mengerti dan taat terhadap tanggung jawab pelaporan yang ada	Memadai	(√)	
17	Melakukan sosialisasi terkait dengan risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi	Memadai	(√)	
V	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;	Memadai		
18	Meningkatkan peran pengawasan yang dilaksanakan pimpinan agar dapat dilakukan secara tepat	Memadai	(√)	
19	Melakukan rapat dengan para pegawai guna meningkatkan pengawasan	Memadai	(√)	
VI	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memadai	(√)	
20	Melakukan Updating SOP terkait dengan prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat	Memadai	(√)	
21	Melakukan rapat staf dengan pegawai terkait dengan Kebijakan SDM yang belum dipahami oleh pegawai	Memadai	(√)	

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Prioritas	Tidak Prioritas
1	2	3	4	5
22	Melakukan updating SOP terkait dengan Prosedur rekrutmen dan retensi, maupun prosedur penyingkiran SDM telah tersedia	Memadai	(√)	
23	Melakukan pengusulan ke BKD bahwa setiap SDM yang direkrut harus memenuhi kebutuhan posisi yang ada atau sesuai dengan Peta Jabatan	Memadai	(√)	
24	Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa proses pergantian jabatan untuk posisi kunci dilakukan dengan lelang jabatan	Memadai	(√)	
25	Memberikan sosialisasi kepada para pegawai untuk melakukan pengunduran diri dapat dilakukan dengan syarat minimal 1 tahun menjelang TMT Pensiun	Memadai	(√)	
26	Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa bagi yang akan mengikuti pendidikan tambahan telah tersedia pada DPA OPD	Memadai	(√)	
27	Melakukan evaluasi kinerja manajemen telah tersedia setiap bulan oleh Petugas Pengukuran Hasil Kinerja setiap bulan	Memadai	(√)	

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom 1 Sudah jelas

Kolom 2 Diisi dengan sub unsur lingkungan pengendalian dan rencana tindakan perbaikan lingkungan yang direncanakan atas sub unsur tersebut

Kolom 3 Diisi dengan simpulan atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian (Memadai, Cukup Memadai, Kurang Memadai, Tidak Memadai)

Kolom 4 Diisi dengan *tick mark* (√) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika dianggap prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah terkaitKolom 5 Diisi dengan *tick mark* (√) atas masing-masing rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian jika tidak dianggap prioritas oleh Pimpinan Instansi Pemerintah terkait

DESAIN AKTIVITAS PENGENDALIAN										
LEVEL MANAJEMEN ENTITAS										
Nama Instansi Pemerintah (K/L/F)		0								
Nama Eselon I		-								
Nama Eselon II (Satker/SKPD)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
RENCANA STRATEGIS										
Visi (Vision)		Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel								
Misi (Mision)		0								
Tujuan Jangka Panjang (Goals)		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas								
Tujuan Jangka Pendek		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas								
AKTIVITAS PENGENDALIAN										
No	Pernyataan Risiko	Penyebab	Kegiatan Pengendalian yang seharusnya ada	Kegiatan pengendalian yang telah ada (existing)			Kegiatan Pegendalian baru (KSOP) yang perlu dibangun		Pemilik Risiko	Penanggung Jawab
				Kegiatan Pengendalian (yang sudah ada)	Substansi yang dimuat dalam kegiatan pengendalian (efektivitas pengendalian)	Penyebab belum memadainya kegiatan pengendalian	Kegiatan Pengendalian	Substansi yang dimuat dalam Kegiatan Pengendalian		
1	2		5	6	7	9	11	12	13	13
1	Belum optimalnya penyusunan pendekatan perencanaan secara partisipatif	Pelaksanaan Musrenbang waktunya/harinya terbatas, Unsur masyarakat yang terlibat terbatas, penyampaian pendapat pada saat musrenbang substansinya tidak sesuai, tingkat kehadiran masyarakat yang minim, pengumuman pelaksanaan musrenbang yang mendadak karena menyesuaikan dengan jadwal Kepala Daerah dan kelompok masyarakat, Standar Biaya media untuk pengumuman/peliputan yang tinggi	Mempublikasikan kegiatan Musrenbang jauh-jauh hari dan mengupayakan penyesuaian biaya pengumuman/peliputan di media dengan Standar Biaya	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pelaksanaan Kegiatan melibatkan SKPD lain	Mempublikasikan kegiatan Musrenbang jauh-jauh hari dan mengupayakan penyesuaian biaya pengumuman/peliputan di media dengan Standar Biaya	efektif	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
2	Belum optimalnya kesesuaian antara RKPD dengan KUA PPAS	Pembahasan di DPRD yang mempunyai fungsi Budgetting	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pelaksanaan Kegiatan melibatkan SKPD lain	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	efektif	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

3	Pemakaian aplikasi Sakato Plan belum optimal	Kompetensi SDM dan aplikasi Sakato Plan yang belum terintegrasi	Peningkatan Kompetensi SDM dan penyempurnaan aplikasi Sakato Plan	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pelaksanaan Kegiatan melibatkan SKPD lain	Peningkatan Kompetensi SDM dan penyempurnaan aplikasi Sakato Plan	efektif	Kasubid Sumber Daya Manusia	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
4	Tidak tersedianya data usulan proyek daerah berserta progres yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Swasta (badan Usaha)	Kurangnya pemahaman stakeholder akan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha mengakibatkan kurangnya pengusulan proyek	1. Menyurati kab/kota 2. Rapat koordinasi dengan Kab/kota dan OPD terkait 2. Peningkatan SDM Staf	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	cukup memadai	Kurangnya koordinasi dan komitmen bersama untuk pengusulan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha	1. Menyurati kab/kota 2. Rapat koordinasi dengan Kab/kota dan OPD terkait 2. Peningkatan SDM Staf	efektif	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
5	Belum optimalnya kesesuaian antara KUA PPAS dengan RKPd	Pembahasan di DPRD yang mempunyai fungsi Budgetting	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan	Belum efektif	Pelaksanaan Kegiatan melibatkan SKPD lain	Melaksanakan pembahasan dengan DPRD secara kontinue dan melakukan edukasi dengan Sekretariat DPRD sebagai penghubung dengan DPRD	efektif	Kasubid Sumber Daya Manusia	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
6	Tidak terdistribusikannya dokumen perencanaan tepat waktu	Keterlambatan cetak dokumen	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Pendistribusian sesuai skala prioritas	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Rapat internal	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Pendistribusian sesuai skala prioritas	efektif	Kasubag Umum	Sekretaris	
7	Peningkatan kapasitas perencanaan belum terpenuhi	Penerapan regulasi yg belum jelas, keterbatasan anggaran untuk pengiriman diklat	1. koordinasi dengan BKD Prov dan biro organisasi. 2. koordinasi dengan instansi pembina 3. koordinasi dengan tim TAPD	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Rapat internal	1. koordinasi dengan BKD Prov dan biro organisasi. 2. koordinasi dengan instansi pembina 3. koordinasi dengan tim TAPD	efektif	Kasubag Program	Sekretaris	
8	Tidak tersedianya data, analisis untuk perumusan masalah dan isu strategis dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan	Mengumpulkan saran dan informasi untuk penyempurnaan draft RPJMD	rapat koordinasi penyusunan dokumen	cukup memadai	koordinasi antar anggota tim	Mengumpulkan saran dan informasi untuk penyempurnaan draft RPJMD	efektif	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	
9	kwaliitas data dan informasi yang disajikan	kemampuan SDM dalam menyajikan informasi sesuai kaidah jurnalistik	peningkatan kemampuan jurnalistik SDM	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan	Belum efektif	Rapat internal	peningkatan kemampuan jurnalistik SDM	efektif	Kasubag Program	Sekretaris	
10	Belum tercapainya penyelenggaraan data dan informasi spasial secara terintegrasi, tidak terlaksanannya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	Belum tersedianya data spasial yang memenuhi standar yang berlaku dan pengurangan anggaran akibat rasionalisasi anggaran akibat covid 19	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi	kerangka kerja (framework) dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)	Kurang efektif	Belum efektifnya pelaksanaan rapat koordinasi pada sub SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kooordinasi dan sosialisasi	efektif	Kasubid Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan wilayah	
11	Data yang diterima tidak akurat	Tidak ada penanggungjawab data pada OPD teknis terkait	Pemetaan data, verifikasi dan evaluasi terhadap data yang dibutuhkan	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya rapat forum data dalam menyediakan dokumen yang memadai	Pemetaan data, verifikasi dan evaluasi terhadap data yang dibutuhkan	efektif	Kasubid Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	

12	Tidak adanya partisipasi pemerintah dalam kerjasama di tingkat regional maupun internasional	Tidak adanya usulan kegiatan yang dapat dikerjasamakan di tingkat regional maupun internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional	cukup memadai	Kurangnya koordinasi dan komitmen bersama untuk pengusulan kegiatan kerjasama lingkup regional dan internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional	efektif	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
13	1)Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	1) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait dan kabupaten/kota serta Non Pemerintah untuk program/kegiatan pendukung SDGs	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	cukup memadai	Kurangnya komitmen bersama untuk Pencapaian Target SDGs	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	efektif	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	
14	laporan RAD tidak maksimal	2) keterbatasan informasi dari kab.kota	melakukan monitoring dan rapat2 dengan kab.kota, pemantauan dengan Bapenas	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	cukup memadai	Kurangnya komitmen bersama untuk Pencapaian Target SDGs	melakukan monitoring dan rapat2 dengan kab.kota, pemantauan dengan Bapenas	efektif	Kasubid Pendanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	
15	Tidak terlaksananya koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	1) Minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan 2) Kurangnya pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
16	pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yg ditetapkan	Jadwal pelaksanaan bertepatan drngan kegiatan lain	Melakukan reskedul	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Melakukan reskedul	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
17	tidak tercapainya target program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat	Jadwal pelaksanaan bertepatan drngan kegiatan lain	menyusun SOP dan melakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota serta melibatkan TNP2K atau K/L terkait lainnya	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	menyusun SOP dan melakukan rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota serta melibatkan TNP2K atau K/L terkait lainnya	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
18	belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan dan tertundanya dan terkendalanya beberapa kegiatan akibat protokol covid 19	1. kurangnya komitmen pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan, 2 Protokol Covid 19 yang harus dipatuhi	peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan penerapan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan new normal	peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan,	cukup memadai	'- masih belum optimalnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program IPDMIP	peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan penerapan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan new normal	efektif	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
19	1)Tidak tersedianya dokumen RAN PPD 2022	1) Minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, 2) Kurangnya pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan,	Komitmen antar pemangku kepentingan	Komitmen antar pemangku kepentingan	Cukup memadai	Belum efektifnya pelaksanaan program/kegiatan PDT	Komitmen antar pemangku kepentingan	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	

20	2) Tidak tercapainya target program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dengan daerah tertinggal di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten daerah tertinggal serta perangkat daerah terkait di daerah	Komitmen antar pemangku kepentingan	Cukup memadai	Belum efektifnya pelaksanaan program/kegiatan PDT	Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan kabupaten daerah tertinggal serta perangkat daerah terkait di daerah	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan pembangunan	
21	Tidak tersedianya buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	Keterlambatan laporan disampaikan oleh OPD	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
22	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Keterbatasan SDM di OPD dalam mengolah dan mengumpulkan data,	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi data, rapat-rapat.	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi data, rapat-rapat.	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
23	Tidak tersedianya laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	Juklak dan juknis terlambat dari K/L, perubahan DIPA, pemindahan lokasi kegiatan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat.	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat.	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
24	Penyampaian laporan e-monev tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	1) Monitoring kelengkapan tidak maksimal, 2) Rapat monitoring tidak terlaksana	1) Meminta data melalui media informasi ke Kab/Kota, 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	1) Meminta data melalui media informasi ke Kab/Kota, 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan OPD dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
25	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan dan kerjasama pembangunan ekonomi baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	1. kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dan OPD; 2. tidak diacunya kalender dan mekanisme perencanaan sesuai Permendagri 86/2017, 3. tidak diacunya dokumen perencanaan RPJMD, dan RKPD dan renstra dalam penyusunan rencana kerja OPD. 4. Rasionalisasi anggaran akibat covid 19	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang ekonomi, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	Rapat koordinasi terkait rencana pengembangan sektor ekonomi	Sedang	Evaluasi terhadap inovasi sektor ekonomi	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang ekonomi, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	efektif	Kasubid Ekonomi	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
26	Pelaksanaan rapat tidak sesuai jadwal yang direncanakan	1) Peserta rapat tidak bisa hadir karena ada tugas lainnya, 2) Peserta rapat diwakili oleh yang tidak berkompeten	1) Komitmen antar pemangku kepentingan 2) Mereskedul jadwal rapat	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	1) Komitmen antar pemangku kepentingan 2) Mereskedul jadwal rapat	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	

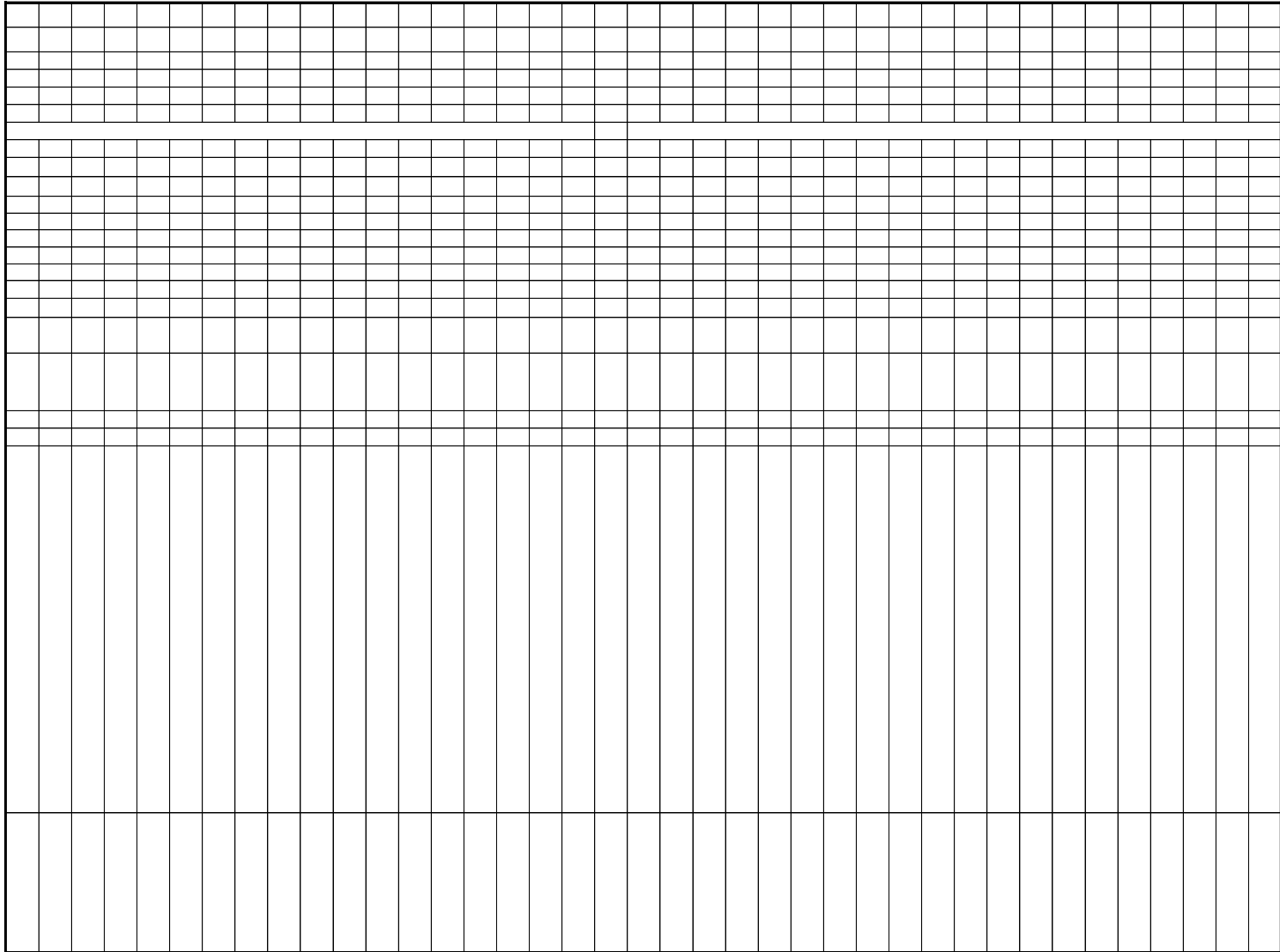
27	Penyampaian laporan terlambat dari OPD	1) Keterbatasan SDM di OPD dalam mengumpulkan data, 2) keterbatasan waktu dalam membuat laporan, 3) tidak adanya pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan	1) Membuat surat permintaan laporan ke OPD dengan batas waktu yang ditentukan 2) Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, rapat-rapat, dan verifikasi.	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	1) Membuat surat permintaan laporan ke OPD dengan batas waktu yang ditentukan 2) Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, rapat-rapat, dan verifikasi.	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
28	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pertanian dan Perikanan	Kurangnya pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan Rasionalisasi Akibat Covid 19	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	Telah memadai	Evaluasi terhadap inovasi sektor ekonomi	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	efektif	Kasubid Ekonomi	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
29	Tidak terlaksananya secara optimal akselerasi dan sinkronisasi perencanaan bidang perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha	Kurangnya pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan Rasionalisasi Akibat Covid 19	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	Telah memadai	Rapat koordinasi untuk akselerasi	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	efektif	Kasubid Ekonomi	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
30	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran	1. kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dan OPD; 2. tidak diacunya kalender dan mekanisme perencanaan sesuai Permendagri 86/2017, 3. tidak diacunya dokumen perencanaan RPJMD, dan RKPD dan renstra dalam penyusunan rencana kerja OPD. 4. Rasionalisasi anggaran akibat covid 19	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang SDA Tata Ruang dan LH, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	Rapat-rapat Koordinasi tingkat Daerah dan Nasional	Kurang efektif	Belum efektifnya pelaksanaan rapat koordinasi pada sub SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan bidang SDA Tata Ruang dan LH, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	efektif	Kasubid Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan wilayah	
31	Tidak tercapainya target sasaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan tidak terlaksananya sebagian kegiatan akibat covid19	Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan rasionalisasi kegiatan akibat covid 19	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	Rapat-rapat Koordinasi tingkat Daerah dan Nasional	Kurang efektif	Belum efektifnya pelaksanaan rapat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Peningkatan Koordinasi dan sosialisasi	efektif	Kasubid Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan wilayah	

32	1. Tidak terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi, 2. Tidak terlaksananya sebagian besar kegiatan karena rasionalisasi anggaran	1. kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dan OPD; 2. tidak diacunya kalender dan mekanisme perencanaan sesuai Permendagri 86/2017, 3. tidak diacunya dokumen perencanaan RPJMD, dan RKPD dan renstra dalam penyusunan rencana kerja OPD. 4. Rasionalisasi anggaran akibat covid 19	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	Belum efektif	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan sub infrastruktur kewilayahan	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD	efektif	Kasubid Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
33	1. Belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung sanitasi pemukiman. 2) Sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran	rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid 19	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	kurangnya pemahaman terkait aspek perencanaan sanitasi pemukiman dari OPD dan lembaga terkait, tidak aktifnya pokja/lembaga yang menangani sanitasi pemukiman, keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional pokja sanitasi pemukiman	Telah memadai	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan sub infrastruktur kewilayahan	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	efektif	Kasubid Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
34	Sebagian besar kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran	rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid 19	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	peningkatan koordinasi, sosialisasi untuk kesinambungan program Pasca WISMP,	Belum efektif	- masih belum optimalnya pemahaman pemangku kepentingan terkait pembagian alokasi anggaran serta pelaksanaan kegiatan Hibah dan APBD	Peningkatan Kooordinasi dan sinkronisasi	efektif	Kasubid Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	
35	Tidak tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota pada bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.	Masih tingginya ego sektoral OPD yang terlibat	Peningkatan koordinasi antar sektor secara integrasi melalui Rapat Koordinasi, mengikuti rapat-rapat tingkat pusat dan melakukan verifikasi renja	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	Peningkatan koordinasi antar sektor secara integrasi melalui Rapat Koordinasi, mengikuti rapat-rapat tingkat pusat dan melakukan verifikasi renja	efektif	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	

36	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Dukungan anggaran yang tidak sesuai, belum maksimalnya komitmen SKPD dalam pencapaian sasaran, keterbatasan informasi dan SDM	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	efektif	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
37	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang pemerintahan dan Aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Dukungan anggaran yang tidak sesuai, belum maksimalnya komitmen SKPD dalam pencapaian sasaran, keterbatasan informasi dan SDM	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	efektif	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
38	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang sumber daya aparatur dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory dari pusat	Dukungan anggaran yang tidak sesuai, belum maksimalnya komitmen SKPD dalam pencapaian sasaran, keterbatasan informasi dan SDM	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan menghadirkan SDM yang kompten dalam setiap rapat koordinasi	efektif	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
39	Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga (SABRT) belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan belum optimalnya koordinasi penyediaan PAMSIMAS	Komitmen Daerah dalam Pelaksanaan Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga (SABRT) yang masih rendah untuk menggunakan SABRT, dukungan anggaran di Kabupaten/Kota yang terbatas, SDM yang terbatas dan informasi yang sering terlambat	Advokasi ke kab/ko, mengadakan bintek/workshop untuk SDM Kab/Ko, pendampingan terhadap penyelesaian masalah dan mengadakan Rakor dengan pemerintah pusat, kab/ko	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	Advokasi ke kab/ko, mengadakan bintek/workshop untuk SDM Kab/Ko, pendampingan terhadap penyelesaian masalah dan mengadakan Rakor dengan pemerintah pusat, kab/ko	efektif	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
40	1) Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat 2) Tidak tersusunnya laporan	Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis terkait terhadap proses perencanaan pembangunan	usulan rakorrenbang OPD Provinsi dan Kab/Kota	usulan rakorrenbang OPD Kab/Kota dapat difasilitasi dan direalisasikan	cukup memadai	Belum sinkronnya perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/Kota	usulan rakorrenbang OPD Provinsi dan Kab/Kota	efektif	Kasubid SIP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaan pembangunan	

41	tidak tercapainya target program/kegiatan yang bersifat lintas sektor	kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan pusat dan daerah	Menyusun SOP, melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Pusat	usulan rakorrenbang OPD Kab/Kota dapat difasilitasi dan direalisasikan		Belum sinkronnya perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/Kota	Menyusun SOP, melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat, Koordinasi Pemerintah dengan Pemerintah Pusat	efektif	Kasubid SIP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	
42	Tidak terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Pangan dan Gizi bagi Balita dan stunting	Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait untuk program/kegiatan pangan gizi bagi Balita dan Stunting	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting	cukup memadai	Kurangnya koordinasi dan komitmen bersama untuk mengurangi gizi buruk dan stunting	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting	efektif	Kasubid SIP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	
43	Dokumen perencanaan yang dievaluasi tidak konsistensi dan sinergisitas	Tidak mempedomani ketetapan yang ada (peraturan), sehingga evaluasi tidak terlaksana.	Komitmen antar pemangku kepentingan	Komitmen antar pemangku kepentingan	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Komitmen antar pemangku kepentingan	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
44	Evaluasi Dokumen perencanaan terlambat dari jadwal yang sudah ditetapkan	1. Kurang memahami tahapan pelaksanaan evaluasi, (2) tidak mempedomani ketetapan yang ada (peraturan), (3) keterbatasan SDM di OPD dan Kab/Kota dalam melakukan evaluasi, (4) Dokumen perencanaan terlambat disampaikan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat, konsultasi, peningkatan SDM di OPD dan kab/kota.	Komitmen antar pemangku kepentingan		Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan	Membuat KAK, SK, jadwal kegiatan, verifikasi laporan dalam aplikasi, kunjungan lapangan, rapat-rapat, konsultasi, peningkatan SDM di OPD dan kab/kota.	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	
45	PUG belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	1) Komitmen terhadap Pelaksanaan PUG masih rendah, 2) Adanya duplikasi tanggungjawab SKPD Teknis dengan Bappeda, 3) Kualitas SDM	1. Rapat Koordinasi secara berkala 2. Rencana Aksi Daerah PUG, 3) Pemantauan/Monev melibatkan Kantor Staf Presiden melalui MOU dan PKS	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Belum efektif	Pengendalian masih manual	1. Rapat Koordinasi secara berkala 2. Rencana Aksi Daerah PUG, 3) Pemantauan/Monev melibatkan Kantor Staf Presiden melalui MOU dan PKS	efektif	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	
46	Tidak tersedianya usulan program/kegiatan daerah yang akan dibiayai dengan dana APBN dalam aplikasi perencanaan nasional	Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan aplikasi perencanaan di tingkat pusat dan perubahan mekanisme pembahasan Kortekrenbang	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat	cukup memadai	pelaksanaan rakortek/kortekrenbang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat	efektif	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	

47	program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak sinergi dan terintegrasi	kurangnya koordinasi dan pemahaman aparaturnya dalam mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan	Koordinasi, peningkatan kapasitas TKPK dengan melibatkan Kabupaten/kota dan TNP2K	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	Telah memadai	Kurangnya komitmen pimpinan	melakukan Rapat Koordinasi, peningkatan kapasitas TKPK dengan melibatkan Kabupaten/kota dan TNP2K	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
48	Menurunnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	1) Kurangnya pemahaman TKPK terhadap regulasi/metode yang ada, 2) Manajemen aparatur yang sering berubah	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	Telah memadai	Kurangnya komitmen pimpinan	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
49	keterlambatan jadwal pembahasan revisi perda	Para pihak terkait ada jadwal tugas lainnya	koordinasi dg pihak DPRD, membuat kesepakatan dengan pihak terkait dan reskedul	Kesesuaian kondisi, permasalahan, isu, arah kebijakan, sasaran dan indikator dengan keadaan dan kemampuan daerah	Telah memadai	Belum efektifnya koordinasi dalam penyusunan dokumen Perda	koordinasi dg pihak DPRD, membuat kesepakatan dengan pihak terkait dan reskedul	efektif	Kasubid Perencanaan Makro	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
	PETUNJUK PENGISIAN									
	- Kolom 1	Sudah jelas								
	- Kolom 2	Diisi dengan uraian pernyataan risiko yang diidentifikasi								
	- Kolom 3	Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko, baik yang bersumber internal maupun eksternal								
	- Kolom 4	Diisi dengan uraian tingkat dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut terjadi (1 sangat rendah; 2 rendah; tinggi; sangat tinggi)								
	- Kolom 5	Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang sebaiknya ada untuk mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian diidentifikasi berdasarkan sub unsur aktivitas pengendalian yang relevan								
	- Kolom 6	Diisi dengan uraian identifikasi infrastruktur yang telah ada								
	- Kolom 7	Diisi dengan uraian substansi identifikasi infrastruktur yang telah ada (telah memadai, cukup memadai, kurang memadai)								
	- Kolom 8	Diisi dengan jenis pengendalian atas identifikasi infrastruktur yang telah ada								
	- Kolom 9	Diisi dengan uraian penyebab belum memadainya infrastruktur yang telah ada								
	- Kolom 10	Diisi dengan uraian langkah penguatan/perbaikan infrastruktur yang telah ada								
	- Kolom 11	Diisi dengan uraian infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun								
	- Kolom 12	Diisi dengan uraian substansi infrastruktur pengendalian yang masih perlu dibangun								
	- Kolom 13	Sudah jelas								



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
A	RTP ATAS PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN								
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1.) Melakukan sosialisasi atau rapat dengan pegawai terkait dengan pelaksanaan penegakan kode etik 2.) Memanggil pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik	Sekretaris	Perda, Pergub ttg kode etik	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√
2	Komitmen terhadap Kompetensi	1.) Melakukan pengusulan penempatan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis jabatan 2.) Membuat surat terkait dengan seleksi terbuka untuk jabatan yang lowong 3.) Melakukan pengusulan pelatihan sebelum pegawai menduduki posisi penting 4.) Melakukan Updating SOP untuk menilai kompetensi pegawai yang belum terdokumentasikan secara memadai 5.) Melakukan pendataan terhadap assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci agar didokumentasikan secara lengkap	Sekretaris	Anjab, Formasi Jabatan	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	1.) Membuat uraian tugas setiap pegawai 2.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait dengan tujuan pengendalian intern 3.) Melakukan rapat staf agar gaya dan	Sekretaris	Pergub, telaahan staf	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
		"tone" kepemimpinan dapat dirasakan secara kondusif baik di dalam maupun di luar organisasi 4.) Melakukan diskusi terkait dengan risiko, pengendalian dan ketaatan pada saat rapat 5.) Melakukan rapat staf, sehingga Kepemimpinan organisasi dirasakan memadai dalam melaksanakan tugas 6.) Mengikutkan staf /pegawai untuk mengikuti pelatihan/ workshop terkait dengan pengendalian intern 7.) Mengikutkan setiap pegawai turut serta dalam menetapkan tujuan pengendalian intern							
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan	1.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa desain struktur organisasi sudah sesuai dengan ukuran dan karakternya (Pergub No. 68 Tahun 2016) 2.) Melakukan/memberikan pemahaman kepada pejabat yang ditunjuk agar mengerti dan taat terhadap tanggung jawab pelaporan yang ada 3.) Melakukan sosialisasi terkait dengan risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi	Sekretaris	Pergub	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat	1.) Meningkatkan peran pengawasan yang dilaksanakan pimpinan agar dapat dilakukan secara tepat 2.) Melakukan rapat dengan para pegawai guna meningkatkan pengawasan	Sekretaris	Pergub, Struktur	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	1.) Melakukan Updating SOP terkait dengan prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat 2.) Melakukan rapat staf dengan pegawai terkait dengan Kebijakan SDM yang belum dipahami oleh pegawai 3.) Melakukan updating SOP terkait dengan Prosedur rekrutmen dan retensi, maupun prosedur penyaringan SDM telah tersedia 4.) Melakukan pengusulan ke BKD bahwa setiap SDM yang direkrut harus memenuhi kebutuhan posisi yang ada atau sesuai dengan Peta Jabatan 5.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa proses pergantian jabatan untuk posisi kunci dilakukan dengan lelang jabatan 6.) Memberikan sosialisasi kepada para pegawai untuk melakukan pengunduran diri dapat dilakukan dengan syarat minimal 1 tahun menjelang TMT Pensiun 7.) Melakukan sosialisasi kepada pegawai bahwa bagi yang akan mengikuti pendidikan tambahan telah tersedia pada DPA OPD 8.) Melakukan evaluasi kinerja manajemen telah tersedia setiap bulan oleh Petugas Pengukuran Hasil Kinerja setiap bulan	Sekretaris	SOP, Data Kepegawaian	email, whatshap, telepon	berkelanjutan (pemantauan, monitoring)	unit-unit kerja strategis pada akhir tahun	√	√

[illegible]

[illegible]

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
1	Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi program RKPD antara stakeholder, Kab/kota serta Pusat	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
2	Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RAPBD	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada					
3	Konsistensi dokumen perencanaan belum terpenuhi	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
4	1)Tidak tersedianya data usulan proyek daerah yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Swasta (badan Usaha)	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada					
5	Tersedianya buku RKPD sebagai acuan penyusunan KUA PPAS dan Buku RKPD Perubahan sebagai acuan penyusunan KUPA PPAS Perubahan	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan	Sekretaris	Kegiatan/acara/event yang dilaksanakan oleh bidang-bidang	Rapat Monitoring	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
6	Tidak terdistribusikannya dokumen perencanaan tepat waktu	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Sekretaris	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang	Rapat Monitoring	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				ada					
7	Peningkatan kapasitas perencanaan belum terpenuhi	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Sekretaris	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada	Rapat Monitoring	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor		
8	Tidak tersedianya data, analisis untuk perumusan masalah dan isu strategis dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	rapat koordinasi penyusunan dokumen	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	SK, Dokumen Perencanaan	Rapat koordinasi	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	✓	✓
9	Tidak adanya update data dan informasi yang di publikasikan pada website www.bappeda.sumbarprov.go.id	Evaluasi terkait informasi yang belum tersampaikan	Sekretaris	Kegiatan/acara/event yang dilaksanakan oleh bidang-bidang	Rapat Monitoring	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	✓	✓
10	Belum tercapainya penyelenggaraan data dan	kerangka kerja (framework) dalam bentuk Infrastruktur Data Spasial	Kepala Bidang Ekonomi dan	RPJMD, peraturan perundang-	Rapat Koordinasi	Monitoring dan evaluasi	Evaluasi Terpisah	✓	✓

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
	informasi spasial secara terintegrasi	Nasional (IDSN)	Pengembangan wilayah	undangan yang mengatur informasi geospasial berbasis GIS		berkelanjutan oleh tim	oleh Auditor		
11	Tidak Tersedianya Database Pembangunan Daerah	Komitmen antar pemangku kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Data makro, permasalahan dan isu penyelenggaraan pembangunan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
12	Tidak adanya partisipasi pemerintah dalam kerjasama di tingkat regional maupun internasional	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerjasama lingkup Regional dan Internasional	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	RPJMD, peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerjasama	Rapat Internal dan rapat Koordinasi Kementerian /Lembaga terkait	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
13	1)Tidak terlaksananya montoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	Rapat Koordinasi berkala monitoring dan evaluasi progres pencapaian target SDGs	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	SK, RAD SDGs	Aplikasi e-Planning untuk SDGs	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
14	Tidak terlaksananya koordinasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Kabid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Data makro dan program/kegiatan terkait kemiskinan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
					kab/kota				
15	belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan	peningkatan koordinasi, sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait untuk mendukung irigasi pertanian yang berkelanjutan,	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	regulasi dan panduan terkait pelaksanaan Program IPDMIP	Pedoman dan panduan pelaksanaan Program IPDMIP, Surat Keputusan Gubernur tentang Provincial Project Management Unit Program IPDMIP	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
16	Tidak tersedianya dokumen RAN PPDT 2022	Komitmen antar pemangku kepentingan	Kabid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Program/kegiatan kegiatan PPDT	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan daerah tertinggal	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
17	Tidak tersedianya buku hasil evaluasi kinerja pembangunan	Pelaksanaan tindak lanjut koordinasi	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan	Realisasi Indikator Capaian dan	Rapat koordinasi bersama	Monitoring berkelanjutan oleh atasan	Evaluasi Terpisah oleh	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
	daerah tahun 2019		Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Keuangan	perangkat daerah	langsung	Auditor		
18	Tidak tersedianya laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	Komitmen antar pemangku kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Realisasi Dekon TP	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
19	Pembangunan bidang ekonomi masih belum optimal sesuai dengan arah pembangunan nasional	Rapat koordinasi terkait rencana pengembangan sektor ekonomi	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Undang-undang, peraturan menteri, RPJMD, Renstra dan RKPD	Rapat koordinasi	Monitoring melalui rapat koordinasi	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
20	Tidak terlaksananya rapat evaluasi dokumen perencanaan, menyebabkan tidak adanya pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan	Komitmen antar pemangku kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan OPD	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
21	Tidak sinkronnya program/kegiatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perkembangan pembangunan pertanian dan perikanan menjadi lambat; 2) Program/kegiatan dan kebijakan pusat belum memperhatikan kebutuhan dan kondisi di daerah	Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	Kepala Bidang Eko-PW	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	Rapat konsolidasi stakeholder	Monitoring melalui rapat koordinasi	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
22	Lambatnya perkembangan pembangunan perekonomian Kabupaten/Kota di bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya	Kepala Bidang Eko-PW	RPJMD, peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah yang mengatur arah kebijakan	Rapat konsolidasi stakeholder	Monitoring melalui rapat koordinasi	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
23	Tidak sinergi dan sinkronnya pelaksanaan program kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan lingkup perencanaan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup baik antar SKPD Provinsi serta Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Rapat-rapat Koordinasi tingkat Daerah dan Nasional	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan wilayah	RPJMD, peraturan perundang-undangan yang mengatur sub bidang SDA, Tata Ruang dan LH	Rapat Koordinasi	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan oleh tim	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
24	Tidak tercapainya target sasaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rapat-rapat Koordinasi tingkat Daerah dan Nasional	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan wilayah	Dokumen perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Rapat Koordinasi	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan oleh tim	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
25	Tidak terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai regulasi	melakukan koordinasi, sosialisasi untuk peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan dan OPD terkait mekanisme perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, melakukan pembahasan rencana kerja OPD dengan mengacu kepada RPJMD	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan, data terkait infrastruktur dan	RPJMN, RPJMD, G44 Renstra OPD	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
		dan RKPD		kewilayahan					
26	belum optimalnya kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung sanitasi pemukima	kurangnya pemahaman terkait aspek perencanaan sanitasi pemukiman dari OPD dan lembaga terkait, tidak aktifnya pokja/lembaga yang menangani sanitasi pemukiman,keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional pokja sanitasi pemukiman	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	regulasi, kebijakan dan aturan terkait perencanaan pembangunan sanitasi permukiman	Renstra OPD ,SK Gubernur terkait Pokja Sanitasi	Jan-00	Jan-00	√	√
27	Tidak berkesinambungnya Program WISMP Pasca berakhirnya Program	peningkatan koordinasi, sosialisasi untuk kesinambungan program Pasca WISMP,	Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	regulasi dan panduan yang mengatur kelembagaan sumberdaya air	Surat Keputusan Gubernur terkait kelembagaan sumberdaya air	Jan-00	Jan-00	√	√
28	Tidak tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota pada bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				5.Tindak lanjut dari kendala yang ada					
29	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
30	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada					
31	Tidak tercapainya target sasaran pembangunan daerah yang berada pada lingkup perencanaan sub bidang sumber daya manusia	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
32	Survey Air Minum Berbasis Rumah Tangga (SABRT) belum menjadi strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah	1. Rapat Monitoring secara berkala 2. Peningkatan SDM Staf	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	1. Ketersediaan anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang	1. Surat, Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
				sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5. Tindak lanjut dari kendala yang ada					
33	1) Tidak terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan antara Gubernur dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat 2) Tidak tersusunnya laporan koordinasi	usulan rakorrenbang OPD Kab/Kota dapat difasilitasi dan direalisasikan	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	RPJMD, Renja OPD	Aplikasi e-Planning	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
34	1) Tidak terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Pangan dan Gizi bagi Balita dan stunting	Koordinasi dan komitmen bersama untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan pangan gizi untuk mengurangi gizi buruk bagi Balita dan Stunting	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	SK, RAD Pangan dan Gizi	Aplikasi e-Planning untuk Pangan dan Gizi	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
35	Tidak terevaluasinya dokumen perencanaan dalam melihat konsistensi, sinergisitas antar dokumen, dan penetapan dokumen dalam satu ketetapan peraturan.	Komitmen antar pemangku kepentingan	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
36	PUG belum menjadi strategi	1. Rapat Monitoring secara berkala	Kepala Bidang	1. Ketersediaan	1. Surat,	Monitoring	Evaluasi	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
	dalam pelaksanaana pembangunan daerah	2. Peningkatan SDM Staf	Sosial Budaya dan Pemerintahan	anggaran dan aliran kas 2. Pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan 3. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 4. Kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan 5.Tindak lanjut dari kendala yang ada	Nota Dinas 2. Notulen Rapat 3. Email 4. Whatsapp	berkelanjutan oleh atasan langsung	Terpisah oleh Auditor		
37	Tidak tersedianya usulan program/kegiatan daerah yang akan dibiayai dengan dana APBN ddalam aplikasi perencanaan nasional	Inventarisasi Usulan untuk kewenangan Pusat	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan pembangunan	SK, Dokumen Perencanaan	Aplikasi e-Planning untuk SDGs	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor	√	√
38	Menurunnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	Evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan	Kabid Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Data makro dan program/kegiatan terkait kemiskinan	Rapat koordinasi bersama perangkat daerah provinsi dan kab/kota	Monitoring berkelanjutan oleh atasan langsung	Evaluasi Terpisah oleh Auditor		
39	Tidak tersedianya Perda tentang Perubahan Perda tentang RPJPD	Kesesuaian kondisi, permasalahan, isu, arah kebijakan, sasaran dan indikator	Kabid Perencanaan	Data makro, permasalahan	Rapat koordinasi	Monitoring berkelanjutan	Evaluasi Terpisah	√	√

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat	Evaluasi Terpisah	2019	2020
	Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	dengan keadaan dan kemampuan daerah	Makro dan Pendanaan Pembangunan	dan isu penyelenggaraan pembangunan	bersama perangkat daerah	oleh atasan langsung	oleh Auditor		